



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HAMDAN
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 441165

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 790.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m²/36 m² di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m²/80 m² di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah Seluas 20000 m² di KAB / KOTA PASAMAN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 88.000.000
4. Tanah Seluas 19829 m² di KAB / KOTA PASAMAN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
5. Tanah Seluas 2650 m² di KAB / KOTA PASAMAN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000
6. Tanah Seluas 249.6 m² di KAB / KOTA PASAMAN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m²/300 m² di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 165.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT MATIC Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU TERIOS LOW SUV Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 13.300.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	382.517.306
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.350.817.306
III. HUTANG	Rp.	247.370.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.103.447.306

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.